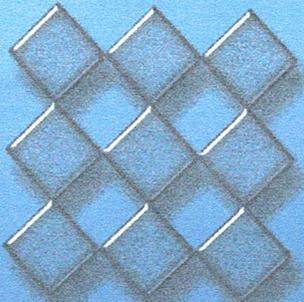


# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018

2018





# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR. Wb.

Atas berkat rahmat Allah SWT Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 ini dapat kami wujudkan sebagaimana mestinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam perwujudan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

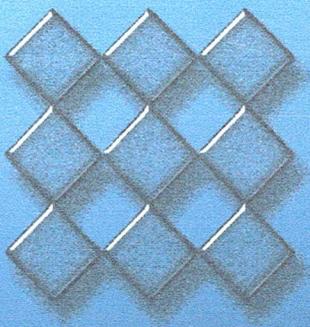
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber, atas kekurangan tersebut kami mohon saran untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Mudah-mudahan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Kuala Tungkal, Januari 2019,

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Ir. H. ANDI AKHMAD NUZUL, ME  
NIP. 19620221 199203 1 004



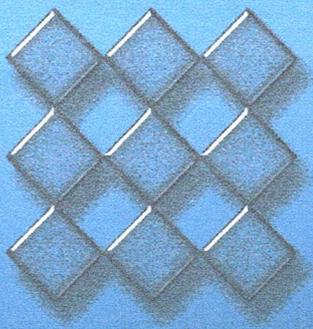
# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1.1
1.2. Isu Strategis .....	1.2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1.2
1.4. Struktur Organisasi .....	1.3
1.5. Kondisi Aset dan Sumber Daya Manusia.....	1.5
a. Kondisi Aset.....	1.5
b. Sumber Daya Manusia.....	1.6
1.6. Landasan Hukum.....	1.8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	II.1
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	II.1
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	II.1
2.1.2. Strategi dan Kebijakan .....	II.2
2.2. Perjanjian Kinerja .....	II.7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	III.1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017.....	III.1
3.2. Realisasi Anggaran.....	III.7
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	IV.1
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
Lampiran 1 : Renstra Dinas PUPR	
Lampiran 2 : Renja Dinas PUPR	
Lampiran 3 : Indikator Kinerja Utama	
Lampiran 4 : Perjanjian Kinerja	
Lampiran 5 : Tabel Pengukuran Kinerja.	
Lampiran 6 : Indikator dan Rencana Pencapaian RPJMD	
Lampiran 7 : Target dan Realisasi dan Outpun kegiatan	
Lampiran 6 : SPM Kementerian PUPR	



# *BAB . 1*

# **PENDAHULUAN**



## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LaKIP).

LaKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LaKIP akan diuraikan mengenai *history* suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menyusun LaKIP Tahun 2018 dan menyampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LaKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut juga merupakan capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pada tahun 2018 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.456.578.143.- untuk mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, adapun program yang menjadi prioritas adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan, serta peningkatan pelayanan air bersih serta dukungan sarana kesehatan yang dilakukan melalui pelaksanaan 18 program oleh Sekretariat dan 4 bidang.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung visi Bupati yaitu Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

## 1.2 Isu Strategis

---

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman (air minum, air limbah, penanganan kumuh) serta penataan ruang dan jasa konstruksi. Infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, antara lain terciptanya konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berusaha keras untuk dapat mewujudkan konektivitas antar wilayah serta terpenuhinya infrastruktur dasar berupa universal akses yaitu kebutuhan akan air minum.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan konektivitas. Dengan adanya peningkatan konektivitas, harga barang di seluruh wilayah relatif sama, serta wilayah yang relatif tertinggal dapat meningkatkan pertumbuhannya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Sementara disebagian besar ibu kota Kabupaten dengan wilayah rawa gambut memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan dengan kondisi sanitasi yang tidak layak dan sulit mengakses air bersih.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah upaya mendukung kedaulatan pangan dengan melakukan peningkatan Pengelolaan Irigasi Teknis serta peningkatkan pengelolaan Daerah Irigasi Rawa.

Dari kondisi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu *leading institution* dalam pembangunan infrastruktur mengemban tugas berat untuk meningkatkan keandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan kedaulatan pangan, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur permukiman dan perumahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global.

## 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

---

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.

#### **1.4 Struktur Organisasi**

---

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 Sekretariat serta 4 bidang dengan rincian terlampir.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas**

- a. Merumuskan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

##### **2. Sekretaris**

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Bidang Sumber Daya Air**

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang sumber daya air.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi dan rawa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan saluran sungai dan drainase primer;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;
- e. Melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah dan permukaan;
- f. Pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala Kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Kepala Bidang Bina Marga**

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang bina marga.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan peralatan laboratorium, penyewaan alat berat, dan pengujian laboratorium atas tanah, beton dan aspal;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan rutin, berkala jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan survey untuk mengetahui kondisi jalan kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Kepala Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang cipta karya
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya, serta pendataan sarana dan prasarana keciptakarya.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, air minum pembangunan sistem penyediaan air minum, dan meningkatkan cakupan pelaksanaan air minum berbasis masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Tata Bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

## 6. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan tata ruang, menyiapkan dokumen RDTR pada setiap kawasan strategis kabupaten;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, strategi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja terampil jasa konstruksi, pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.5 Kondisi Aset dan Sumber Daya Manusia

---

#### a. Kondisi Aset

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saat ini di dukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik untuk menunjang operasionalisasi kegiatan rutin dinas maupun operasionalisasi kegiatan lapangan. Secara lebih rinci kondisi aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat per Desember 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	11.108.839.262,50
2	Peralatan dan Mesin	8.233.898.777,67
3	Gedung dan Bangunan	134.780.725.009,30
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.473.518.150.847,54
5	Aset Tetap Lainnya	2.200.820.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	397.403.262.623,69
7	Aset Lainnya	48.806.485.053,89
	BMD Ekstrakomptabel	475.250,00
<b>TOTAL ASET</b>		<b>3.076.052.657.324,59</b>

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018*

**b. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung jabung Barat berdasarkan data kondisi terakhir (Desember 2018) sebanyak 127 orang dengan rincian 53 orang berstatus PNS, dan 74 orang berstatus Pegawai Honor Daerah.

Untuk komposisi Pegawai Negeri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018**

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
3 Org	Strata 2	Pembina Utama Muda / Ivc	Kepala Dinas	
2 Org	Strata 1	Pembina UTK. I /IVb	Sekretaris	Pelaksana Administrasi

1 Org	Strata 2	Penata TK. I / III d	Kasi	
2 Org	Strata 1	Penata Tingkat I / III d	Kabid	Pelaksana Administrasi
3 Org	SMA	Penata TK. I / III d	Kasi	
1 Org	Strata 2	Penata / III c	Kasi	
1 Org	Strata 1	Penata / III c	Kabid	
3 Org	Strata 1	Penata / III c	Kasi	
1 Org	SMA	Penata / III c	Kasi	
4 Org	Strata 1	Penata Muda TK. I / III b	Kasi	
1 Org	SMA	Penata Muda TK. I / III b	Kasi	
6 Org	SMA	Penata Muda TK. I / III b		Pelaksana
2 Org	Strata 1	Penata Muda TK. I / III b		
12 Org	Strata 1	Penata Muda / III a		
2 Org	Diploma III	Penata Muda		
2 Org	Diploma III	Pengatur TK. I		
1 Org	Diploma III	Pengatur		
3 Org	SMA	Pengatur		
3 Org	SMA	Pengatur Muda TK. I		
1 Org	SMA	Pengatur Muda		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018

## 1.6 Landasan Hukum

---

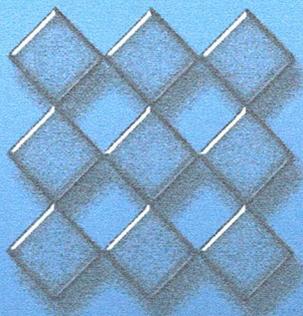
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2016, Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2018, Nomor 38):





# *BAB . 2*

## **PERENCANAAN KINERJA**



## 2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

---

### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas yang menghubungkan seluruh wilayah.
2. Terwujudnya pelayanan air minum dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
4. Terwujudnya peningkatan produktifitas pertanian.
5. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi yang handal.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas jaringan dan jembatan yang berkualitas yang menghubungkan seluruh wilayah.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan.
3. Meningkatnya Pelayanan Sanitasi masyarakat perkotaan.
4. Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan
5. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan yang berlaku.
6. Meningkatnya Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi.

### **2.1.2. Strategi dan Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah.
2. Merencanakan Revitalisasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SPAM IKK dan SPAM BJP Perdesaan.
3. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah, Drainase dan Persampahan.
4. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.
5. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Meningkatnya profesionalisme penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis.

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penanganan jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah.
2. Menyusun rencana Revitalisasi, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SPAM IKK dan SPAM BJP Perdesaan.
3. Menyusun Rencana Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah, Drainase dan Persampahan.
4. Menyusun Rencana, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.
5. Menyusun rencana kegiatan TURBINLAKUWAS Tata Ruang.
6. Menyusun Rencana Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa dan Tenaga Teknis.

Adapun program dan kegiatan utama yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Tanjung untuk Tahun 2016-2021 yaitu :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
- Pengelolaan Aset.

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
  - Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
  
- 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**
  
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Penataran.
  
- 6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**
  
- 7. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**
  
- 8. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja.
  - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
  
- 9. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Statistik Daerah**
  - Pengelolaan / pemutakhiran data aset
  
- 10. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
  - Pembangunan Jalan Baru.
  - Pembangunan Jembatan.
  - Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.

**11. Program Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan**

- Pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Peningkatan Jalan.
- Pemeliharaan Berkala Jalan

**12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

- Pengelolaan Alat Berat.
- Pengadaan Alat Berat.

**13. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.**

- Peningkatan jaringan daerah irigasi.
- Peningkatan jaringan daerah irigasi rawa.
- Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi.

**14. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.**

- Pembangunan Sumur Bor
- Pembangunan PAH
- Pendampingan Pamsimas (DPMU).

**15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum**

- Revitalisasi Jaringan Pipa Air Bersih Tebing Tinggi
- Peningkatan Sistem Pengolahan Air Minum Perpipaan

**16. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman**

- Pembangunan Jalan Poros Desa
- Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
- Pembangunan IPAL

**17. Program Pengembangan Perumahan**

- Pengawasan rutin izin mendirikan bangunan.
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- Sosialisasi Perda Bangunan.

**18. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong**

- Pembangunan Drainase Sekunder

**19. Program Perencanaan Tata Ruang**

- Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
- Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tata Ruang

**20. Program Pemanfaatan Ruang**

- Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- Pengawasan Pemanfaatan ruang
- Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang

**21. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekososbud dan Prasarana Fisik Pemerintahan**

- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- Pembangunan Gedung Kantor
- Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan.
- Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

**22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (ADP)**

- Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI).
- Peningkatan kapasitas tenaga terampil Jasa Kosntruksi

### **23. Program Pengembangan Data dan Informasi**

- Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah (RPI2JM).
- Penyusunan Data Infrastruktur Bidang Kecipta Karya.
- Pemutakhiran Data Infrastruktur Bidang Kecipta Karya.
- Inventarisasi jalan dan jembatan.
- Pemutakhiran data jalan dan jembatan.
- Perencanaan jalan berbasis Arcgis.
- Penyusunan Data Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air.

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

---

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 mencakup 6 (Enam) sasaran strategis yang didukung oleh 18 (delapan belas) program dan 52 kegiatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur untuk mendukung terlaksananya pelayanan administrasi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk mendukung sasaran meningkatnya penanganan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan semua wilayah, Pengembangan dan Pengelolaan Rawa dan Jaringan Pengairan untuk mendukung sasaran meningkatnya kelancaran air irigasi untuk pertanian rakyat, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum untuk mendukung sasaran revitalisasi dan membangun SPAM Perpipaan serta Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Perdesaan), Pengembangan data dan Informasi, Perencanaan Tata Ruang mendukung sasaran tersusunnya perda tata ruang sebagai pedoman ketaatan pelaku usaha, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Pengembangan Perumahan dan Pengembangan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan untuk mendukung sasaran meningkatnya pelayanan dan pengendalian terhadap kegiatan membangun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penanganan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan semua wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panjang pembangunan jalan.</li> <li>2. % panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang</li> </ol>	<p>12 Km</p> <p>55,00%</p>
2	Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan	Jumlah Kecamatan teraliri air irigasi	13 Kecamatan
3	Meningkatnya pelayanan sanitasi masyarakat perkotaan	Pengurangan luasan genangan dipertokoan nasional	28 ha
4	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	70 %
5	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. % Rekomendasi IMB dipatuhi.</li> <li>2. Jumlah peraturan dan kebijakan tata ruang</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>4 Dokumen</p>
7	Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	50,00%

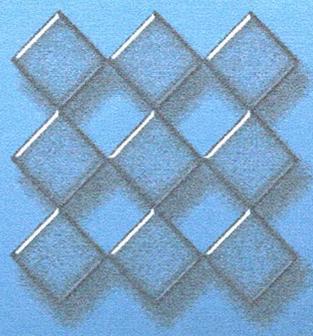
Lampiran 3  
**PENGUKURAN KINERJA 2017 dan 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD	2017						2018							
				TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	REALISASI s/d 2017	capaian terhadap RPJMD (%)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)	REALISASI s/d 2018	capaian terhadap RPJMD (%)
				VOL	SATUAN	VOL	SATUAN				VOL	SATUAN	VOL	SATUAN			
1	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan konektivitas yang menghubungkan semua	1. Panjang Pembangunan Jalan 2. % jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	56 km	12 Km	21,725 Km	181,04 (%)	21,73	38,79 (%)	12 Km	22,609 Km	188,41 (%)	44,334	79,17				
2	Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan	Jumlah kecamatan teraliri air irigasi	13 Kec	13 Kecamatan	6 Kecamatan	46,15 (%)	6,00	46,15 (%)	13 Kecamatan	9 Kecamatan	69,23 (%)	9	69,23				
3	Meningkatnya pelayanan sanitasi masyarakat perkotaan	Pengurangan luasan genangan diperkotaan	250 Ha	28 Ha	10 Ha	35,71 (%)	120,00	48,00 (%)	28 Ha	48 Ha	171,43 (%)	168	67,20				
4	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	% Kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	100 %	62 %	62 %	100,00 (%)	62,00	62,00 (%)	70 %	69,23 %	98,90 (%)	69,23	69,23				
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan	% rekomendasi IMB Jumlah peraturan dan kebijakan tata ruang	2834 Izin 13 Peraturan	100 % 1 Peraturan	108 Izin 1 Dokum	108,00 (%) 100,00 (%)	1942,00 1,00	68,53 7,69 (%)	200 % 4 Peraturan	341 Izin 5 Dokum	170,50 125,00 (%)	2283 6	80,56 46,15				
6	Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi	% penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	65 %	45 %	41 %	91,11 (%)	41,00	63,08 (%)	50 %	37 %	74,00 (%)	37	56,92				



# *BAB . 3*

## **AKUNTABILITAS KINERJA**



# AKUNTABILITAS KINERJA

## BAB 3

### 3.1 . Capaian Kerja Organisasi

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 yang telah ditetapkan . Penilaian dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pengumpulan data kinerja yang dinilai menggunakan setandar nilai peringkat kinerja sesuai tabel dibawah ini. Pengumpulan data kinerja hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel 3 : Skala Nilai Peringkat Kinerja \*)

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

\*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

### 3.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

#### 1. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik, konektifitas yang menghubungkan semua wilayah

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

#### Pembangunan Jalan



#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target IKU Panjang Pembangunan Jalan pada Tahun 2016 adalah 12 Km dan terealisasi 22,609 Km dengan capaian kinerja 188,04 %. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan indikator pada tahun 2017 dengan capaian 181,04.

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Panjang Jalan Konektifitas Yang Terbangun	21,725 Km	12 Km	22,609 Km	188,04	56 Km	79,17 %

Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2016 – 2021 sebesar 56 Km, maka realisasi masih 79,17 %, jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 100 %, realisasi masih berada dibawah SPM Nasional.

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai kinerja dikategorikan AA ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat melalui Bupati untuk memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan Umum.

Dalam pelaksanaan IKU ini juga terdapat Silpa dari proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta efisiensi terhadap penggunaan sumberdana didalam pelaksanaan kegiatan

## Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

### Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang



Target Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2018 adalah 55 % terealisasi 48,9 % dengan capaian kinerja 88,91 % capaian ini dikategorikan sangat baik. Indikator ini tidak merupakan indikator pada Tahun 2017.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	70,97%	55%	48,9%	88,91%	62%	78,87%

Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dan Standar Pelayanan Minimal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 62 %. Maka Pencapaian indikator ini masih 78,87 % dibawah target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 dan Standar Pelayanan Minimar Kementerian Pekerjaan Umum.

Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai kinerja dikategorikan AA ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bupati untuk memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan Umum.

Dalam pelaksanaan IKU ini juga terdapat Silpa dari proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sserta efisiensi terhadap penggunaan sumberdana didalam pelaksanaan kegiatan.

## 2. Sasaran Strategis

Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan

### Indikator Kerja Utama (IKU) 3

Jumlah kecamatan teraliri air irigasi



#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target kinerja Jumlah kecamatan yang teraliri air irigasi pada tahun 2018 adalah 13 Kecamatan dan realisasi 9 Kecamatan. Capaian ini dikategorikan sedang. Adapun Capaian kinerja untuk indikator Jumlah kecamatan yang teraliri air irigasi pada tahun 2018 adalah 69,23 %.

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah kecamatan teraliri air irigasi	46,15%	13 Kecamatan	9 Kecamatan	69,23%	13 Kecamatan	69,23%

Capaian ini dikategorikan sangat baik, capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator pada tahun 2016 karena terdapat perbedaan dimana indikator yang digunakan merupakan indikator out put dari kegiatan.

## 3. Sasaran Strategis

Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Masyarakat Perkotaan

### Indikator Kerja Utama (IKU) 4

Berkurangnya luasan genangan perkotaan



#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target kinerja Berkurangnya luasan genangan perkotaan pada tahun 2018 adalah 28 Ha dan realisasi 48 Ha. Adapun Capaian kinerja untuk indikator berkurangnya luasan genangan perkotaan adalah 171,43 %. Capaian ini dikategorikan sangat Baik,

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Berkurangnya Luasan Genangan Perkotaan	120 Ha	28 Ha	48 Ha	171,43	250 Ha	67,20 Ha

namun untuk mencapai target ini juga ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

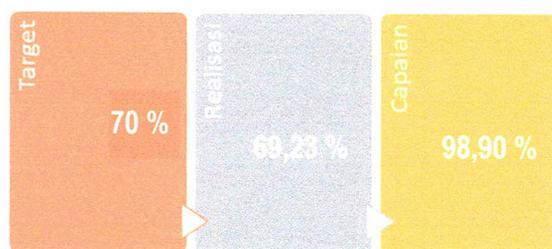
Untuk peningkatan peran serta masyarakat terkait sanitasi ini pemerintah kabupaten harus secara intensif melakukan pemberdayaan masyarakat untuk lebih peduli akan arti pentingnya sanitasi.

#### 4. Sasaran Strategis

##### Meningkatnya Aksesibilitas dan Pelayanan Air Bersih Perpipaan

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) 5

##### Persentase kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih



Target kinerja Persentase kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih pada tahun 2018 adalah 70% dan realisasi 69,23%, Adapun Capaian kinerja untuk indikator Persentase kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih adalah 98,90 %.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	62%	70%	69,23	98,90	100%	69,23%

Capaian ini dikategorikan sedang dan tidak dapat dibandingkan dengan indikator pada tahun 2016 karena terdapat perbedaan pada Tahun 2016 indikator yang digunakan merupakan out put dari kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, terdapat selisih pencapaian sebesar 13,16 % Capaian ini merupakan salah satu ukuran Revitalisasi yang dilakukan terhadap aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang digolongkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan serta wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bupati untuk memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar khususnya air bersih.

## 5. Sasaran Strategis

**Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan berlaku**

### Indikator Kinerja Utama (IKU) 6

**Persentasi Rekomendasi IMB dipatuhi**



Target kinerja Persentase Rekomendasi IMB dipatuhi tahun 2018 adalah 100% setara dengan target jumlah rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 200 buah. Realisasi kinerja adalah 170,5 % (341 buah) dengan capaian ini dikategorikan Sangat Baik.

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Rekomendasi IMB di patuhi	1942	200	341	170,5	2834	80,56%

Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, capaian ini sesuai dengan rencana dan bila dibandingkan dengan SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memang dirasakan masih terlalu jauh untuk mencapainya.

Permasalahan dalam upaya pemenuhan SPM dirasakan sangat berat dimana target SPM Kementerian PUPR pada akhir tahun rencana adalah 100 % dari rumah tinggal telah memiliki IMB.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 7**  
**Jumlah Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang**



Target kinerja Jumlah Peraturan dan kebijakan Tata Ruang tahun 2018 adalah 4 Peraturan dengan realisasi 5 Peraturan dengan capaian kinerja adalah 125 % (Penyelesaian Materi Teknis). Capaian ini di kategorikan sangat baik.

**INDIKATOR KERJA UTAMA**

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang	1 Peraturan	4 Peraturan	5 Peraturan	125	13 Peraturan	46,15%

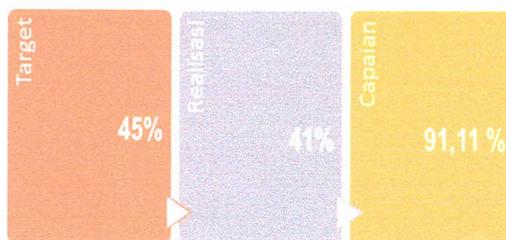
Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, capaian ini belum sesuai dengan rencana karena masih terdapat tahapan yang harus dilakukan yaitu pengajuan Raperda kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**6. Sasaran Strategis**

**Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 8**

**Persentasi Penyedia Jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi**



Target kinerja persentase penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi adalah 50% dengan realisasi kinerja adalah 37 % dengan capaian 74 %. Capaian ini dikategorikan Sedang.

**INDIKATOR KERJA UTAMA**

No.	Indikator Kinerja	2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Presentasi Penyedia Jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi	41%	50%	37%	74%	65%	56,92%

Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang didalam Renstra Tahun 2016 – 2021, capaian ini belum sesuai dengan rencana karena masih terdapat tahapan yang harus dilakukan yaitu Menyelenggarakan pelatihan terhadap penyedia jasa konstruksi dan melakukan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap kualifikasi penyedia jasa konstruksi.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018, besarnya alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 336.485.924.400,- sedangkan untuk gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp. 4.039.264.800,- sehingga total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 340.525.189.200,- dengan tingkat capaian penggunaan dana sebesar Rp. 314.229.416.530,76 (92,28 %) dengan rincian sebagai berikut :

- A. Belanja Tidak Langsung dengan total anggaran sebesar Rp. 4.039.264.800,- direalisasi sebesar Rp. 3.839.916.099,- (95,06 %).
- B. Belanja Langsung dengan total anggaran sebesar Rp 336.485.924.400,- direalisasi sebesar Rp. 310.389.500.431,76 (92,24 %)

Dari rincian Belanja langsung diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

#### I. BAGIAN SEKRETARIAT

Bagian Sekretariat melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.300.490.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.460.641.455,- (74,56 %) dengan 18 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

## 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.108.000,- (70,72 %)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 355.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 242.093.768,- (68,16 %)
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 572.970.000,- dan realisasi sebesar Rp. 391.770.000,- (68,38 %)
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 18.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.800.000,- (58,06 %)
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp 130.335.000,- dan realisasi sebesar Rp. 130.335.000,- (100 % )
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 20.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.500.000,- (100 %)..
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100 %).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp9.080.000,- (60,53 %).
- Penyediaan Makanan dan Minum dengan anggaran sebesar Rp.4.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.600.000,- (54,17 %).
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp 922.735.000,- dan realisasi sebesar Rp. 710.306.087,- (76,98 %).
- Pengelola Aset dengan anggaran sebesar Rp 97.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.250.000,- (96,67 %).

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

:

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 170.946.000,- (92,40 %), untuk capaian fisik 100 %.

Dari kegiatan ini dilaksanakan pengadaan :

- ✓ Infocus, 2 Unit
- ✓ Pendingin Udara 4 Unit
- ✓ Printer A3 4 Unit
- ✓ Printer A4 2 Unit
- ✓ Komputer Desktop 3 Unit.

- ✓ Kursi Rapat 8 Unit
- ✓ Kursi Sofa 1 Set.
- ✓ Almari Arsip 2 Unit.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 215.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 206.430.000,- (82,79 %) atau capaian fisik sebesar 100 %.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 297.00.000,- dan realisasi sebesar Rp. 121.457.600,- (40,89 %), serapan ini dilakukan sebagai salah satu upaya efisiensi yang dilakukan.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.115.000,- (82,79 %).

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 110.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.750.000,- atau sebesar 100,00 %.

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :**

- Bimbingan Teknis dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar -  
 Dari kegiatan ini diinformasikan belum dapat dilakukan mengngat padatnya volume pekerjaan serta terbatasnya jumlah personil.

### **5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :**

- Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 168.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 111.600.000,- atau 66,43 %  
 Terkait kegiatan ini diinformasikan secara kuantitatif seluruh kegiatan pelaporan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, Minimnya persentase penyerapan keuangan adalah peruntukan untuk belanja perjalanan dinas yang belum mampu digunakan.
- Penyusunan Laporan keuangan semesteran sebesar Rp, 96.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 93.500.000,- atau 100,00%

## **II. BAGIAN BINA MARGA**

Bagian Bina Marga melaksanakan 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp157.338.898.400,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 137.383.489.976.80,- (87.32 %) dengan 8 Kegiatan, berikut penjelasan pagu dan realisasi anggaran serta realisasi fisik kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :

- Pembangunan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.612.685.002, dan realisasi sebesar Rp. 17.784.412.996,80,- atau sebesar 76,94 %. Dan realisasi fisik kegiatan adalah 76,94 %, Dari pelaksanaan kegiatan ini telah dibangun ::
  - ✓ Jembatan Beton Pelabuhan Dagang 48 Meter
  - ✓ Jembatan Beton Sungai Tutuhan 17 Meter
  - ✓ Jembatan Beton Merangin di Komplek Perkantoran Merlung.
  - ✓ Jembatan Beton Sungai Pengabuan Merlung dimana persentase fisiknya hanya 35 % karena dikegiatan ini terjadi Force Majeur.
- Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.129.870,- dan realisasi sebesar Rp. 3.724.796.000,- atau sebesar 100,00 %. Dari kegiatan ini telah dilakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan sebagai berikut :
  - Jumlah Paket Kegiatan Perencanaan sebanyak 18 Paket.
  - Jumlah Paket Pelaksanaan Pengawasan sebanyak 8 Paket.
- Pembangunan Jalan Baru dengan anggaran sebesar Rp. 11.179.365.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.028.235.000,- atau sebesar 98,65 %. Realisasi fisik kegiatan adalah 100 % Telah dilakukan kegiatan :
  - Pembangunan Jalan Pelabuhan Dagang – Berasau 2.574 Meter.
  - Pembangunan Jalan Baru Pos Sabar – Jembatan Desa Sri Menanti 1.900 Meter
  - Pembangunan Jalan Baru Desa Sungai Keruh – Delima, 1.195 Meter
  - Disamping kegiatan diatas juga dilaksanaka Karya Bhakti TNI dengan melakukan pembukaan jalan, Tungkal V – Sungai Terap (Batas Riau) 5.540 Meter, Pembukaan Jalan Sungai Dungun – Sungai Dualap 7.300 Meter dan Pembukaan Bukit Bakar – Sungai Paur 6 .000 Meter.
- Pemeliharaan Berkala Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 9.137.010.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.003.520.000,- (98,54 %) untuk penanganan kegiatan fisik berupa Overlay Ruas jalan dengan capaian 100 % yang dilakukan pada ruas jalan ::
  - Jalan Harapan.
  - Jalan Bahari
  - Jalan BTN Permata Hijau
  - Jembatan WFC.
  - Jalan Kapten Darham
  - Jalan Agus Nginut
  - Jalan Nusa Indah

- Jalan Merdeka
- Jalan Bhayangkara
- Jalan Ruas Kuala Tungkal – Batas Kota Kuala Tungkal ( Arah Teluk Sialang).
- Peningkatan Jalan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 20.482.998.400,- dan realisasi sebesar Rp.20.128.787.000,- ( 98,27 %) dari kegiatan ini telah dilaksanakan penanganan perkerasan jalan 8.500 Meter dengan capaian fisik 100 %..
- Pemeliharaan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp, 16.736.5535.000.- dan realisasi sebesar Rp, 15.635.980.320.- atau (93,42 %) dari kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan terhadap ruas jalan :
  - Jalan Beringin.
  - Ruas Jalan Parit 4 – Semau
  - Ruas Serdang – Sungai Dualap
  - Penimbunan Oprit jembatan parit Tagi.
  - Ruas Jalan Tanjung Bojo – Lubuk Bernai.
  - Jalan Kuala Indah.
  - Jalan Manunggal I dan Manunggal II. Jalan Bangkinang
  - Jalan Ketapang
  - Jalan Parit Pudin.
  - Jalan Budiman
  - Jalan Senangin – Jbt. Parit 5
  - Jalan Menuju Parit Ponco.
  - Jalan Bhayangkara
  - Jalan KH. Dewantara dan Bakau
  - Pemeliharaan Jembatan Ruas Teluk Nilau – Senyerang.
- Peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp, 75.910.434.998.- dan realisasi sebesar Rp, 59.927.908.660.- (78,95 %), dengan realisasi fisik 100 % adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan :pada ruas ruas sebagai berikut :
  - Peningkatan Struktur Jalan SP. II Parit IV – Teluk Sialang – Pelabuhan Roro.(Perkerasan 8.500 Meter)
  - Peningkatan Jalan Kuala Dasal Pelabuhan Dagang ( Aspal 3.726 Meter).
  - Ruas Jalan Dusun Mudo – Lubuk Sebontan (Perkerasan 5.000 Meter).
  - Ruas Jalan Lubuk Terap (Perkerasan 4.560 Meter)
  - Ruas Jalan Gatot Subroto (Aspal 995 Meter).
  - Jalan Pahlawan (Sisinga Mangaraja) (Beton 162 Meter).

- Jalan Kantor Bupati (Beton 221 Meter).
- Ruas Jalan Penyabungan – Lubuk Bernai (Perkerasan 4.950 Meter).
- Ruas Jalan 530 – Margo Rukun (3.797 Meter).
- Jalan Patunas (Beton).
- Jalan Diponegoro (Beton 883 Meter).
- Jalan Pahlawan (Beton 192 Meter).
- Jalan Kesejahteraan (Beton 312 Meter).
- Ruas Jalan Desa Purwodadi 4.450 Meter.
- Jalan KH. Dewantara dan Bakau

## **2. Program Peningkatan Sarana Kebinamargaan :**

- Pengadaan Alat – alat Berat dengan anggaran sebesar Rp. 3000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 32.996.266.581,- atau sebesar 99,88 %.

### **III. BAGIAN SUMBER DAYA AIR**

Bagian Sumber Daya Air melaksanakan 1 (satu) program dengan total anggaran sebesar Rp. 25.094.875.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.224.900.000,- (96.53 %) dengan 4 kegiatan berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

#### **1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya :**

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp.9.281.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.092.231.000,- atau 97,96 % dan capaian fisik 100 %.
- Peningkatan Jaringan daerah Irigasi teknis dengan anggaran sebesar Rp. 941.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 848.960.000,- atau 90,21 % dan capaian fisik sebesar 100,00 %.
- Peningkatan jaringan irigasi daerah rawa dengan anggaran sebesar Rp 10.673.425.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.244.097.000,- atau 95,98 % dan capaian fisik sebesar 100,00%
- Peningkatan Irigasi (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 4,198.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.039.612.000,- atau 96,21 % dan capaian fisik sebesar 100,00 %.

Dari pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air ini telah dilakukan :

- Peningkatan/Rehab Jaringan Daerah Rawa :
  - Parit Deli 3000 Meter.(Kuala Betara)
  - Parit Palembang 5.000 Meter.(Kuala Betara)
  - Parit 8 Mekar Tanjung 5000 Meter ( Bram Itam.)
  - Parit 1 Sungai Gebar Barat 4.000 Meter (Kuala Betara).

- Parit 9 dan parit 10 Desa Tanjung pasir 13.000 Meter (Kuala Betara).
- Parit 6 Tungkal I 6.000 Meter (Tungkal Ilir).
- Parit 3 dan 4 Tanjung Sinjulang 8.000 Meter (Bram Itam).
- Parit 20 Tungkal V 6.870 Meter (Seberang Kota).
- Parit Itur Harapan Jaya 10.000 Meter (Seberang Kota).
- Parit Mesjid dan Parit Pulau Pinang Betara Kanan 5.000 Meter (Kuala Betara).
- Daerah Rawa Srintit
  - Parit 1,2 dan 3 Srintit (Pengabuan).
- Daerah Rawa Mekar Jati
  - Parit Serun, Parit 13 dan 14 Sungai Nibung, Parit 4 Lapis, Parit Sungai Buluh, Parit Judin dan Husin. 24.060 meter.
- Peningkatan/Rehab Jaringan Daerah Irigasi Teknis:
  - Pembangunan Bronjong.

#### IV. BAGIAN CIPTA KARYA

Bagian Cipta Karya melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 146.462.346.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.384.693.000,- (97,22 %) dengan 9 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

##### 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Pembangunan Rumah Jabatan dengan anggaran sebesar Rp, 8.036.100.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp, 7.805.494.999,99,- (97,13 %) dan untuk capaian fisik sebesar 100 % untuk Pembangunan Rumah Jabatan Kopel 5 Unit/10 Rumah.
- Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran 9.934.571.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.695.623.999,99,- (97,59 %), untuk capaian fisik kegiatan sebesar 100 %, dari kegiatan ini dilaksanakan pekerjaan :
  - Pembangunan Kantor Camat.
  - Pembangunan Kantor KP3 Tahap 1
  - Pembangunan Mes Kejari.
  - Rehab EX RS Terjun.
  - Pembangunan Gedung Serbaguna Pelabuhan Dagang Lanjutan PNPM.
  - Pembangunan Hall Batang Asam.
  - Lanjutan Pembangunan Bangunan Pelengkap Gor Pembengis.

##### 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong :

- Pembanguna Drainase Sekunder dengan anggaran sebesar Rp, 2.234.150.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp, 2.171.639.000,- (97,20 %) dan capaian fisik kefiatan sebesar 100 % dengan telah

dilaksanakan peningkatan drainase Jl. Pelabuhan dan Jalan Kesejahteraan sepanjang 1.365 Meter.

### **3. Program Penyediaan dan pengolahan Air Baku :**

- Pendampingan PAMSIMAS dengan anggaran sebesar Rp. 144.700.000,- dan realisasi sebesar Rp77.800.000,- (53,77 %), kegiatan ini adalah pendampingan untuk pembinaan Konsultan Program Pamsimas untuk pembangunan sumber air baku untuk air bersih yang didanai APBN dan APBD di 18 Desa.
- Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan anggaran sebesar Rp. 252.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 216.100.000,- (85,69 %), kegiatan dapat diselesaikan 100 %.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air dan Tknologi Sumber Daya dengan anggaran sebesar Rp. 145.575.000,- realisasi sebesar Rp 131.675.000,- ( 90,45%, kegiatan dapat diselesaikan 100,00 %.

### **4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum :**

- Revitalisasi Jaringan Pipa Air Bersih dengan anggaran sebesar Rp. 84.988.550.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.320.188.999,98,- ( 98,04 % untuk capaian fisik kegiatan sebesar 100 % terdiri dari pekerjaan :
  - Penambahan Intake Kapasitas 150 L/dt.
  - Pembangunan IPA Kapasitas 200 Lt/dt.
  - Pembangunan Reservoir 2 x 400 M3.
  - Pemasangan JTR.
  - Pengadaan dan Pemasangan Pipa, 4.445 Km terdiri dari pipa dia. 400 dan 300.
- Peningkatan Sistem Pengolahan Air Minum Perpipaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.414.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.170.831.000,- (97,66 %) dan capaian fisik kegiatan sebesar 100 % dengan uraian sebagai berikut :
  - Pengadaan dan Pemasangan Pipa 49.325 Meter terdiri dari pipa Dia 200, 150, 100, 75 dan 50 Meter.
  - Pengadaan Sambungan Rumah 2.190 Unit.
- Pengembangan Jaringan SPAM Regional (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 3.085.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.959.243.000,- (95,92 %). Realisasi fisik 100 % Telah dilakukan kegiatan
  - Pengadaan dan Pemasangan Pipa 9.708 Meter untuk pipa Dia 100, 75 dan 50 Meter
  - Pengadaan SR 1.000 Unit..

### **5. Program Peningkatan Sarana Kesehatan :**

- Peningkatan Puskesmas Merlung dengan anggaran sebesar Rp. 24.690.350.000,- dan realisasi sebesar Rp 23.355.440.000,- (94,59 %) dan realisasi fisik 100 % untuk membangun 6 Unit Bangunan pendukung.

## **6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga :**

- Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan anggaran sebesar Rp, 2.536.150.000 dan realisasi sebesar Rp, 2.480.658.000,- (97,81 %) dan telah dilakukan pekerjaan :
  - Pembuatan Box Culvert
  - Pembangunan Jalan Masuk.
  - Pengecoran Lantai Gedung Serbaguna.

## **V. BAGIAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI**

Bagian Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi melaksanakan 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.943.695.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.415.752.345,- (73 %) dengan 6 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

### **1. Program Perencanaan Tata Ruang :**

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS-RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 866.075.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 815.715.000,- 94,19 % dan capaian fisik kegiatan sebesar 100 % dengan keluaran Tersusunnya KLHS untuk 4 Pusat Pengembangan.
- Master plan RTH Kab. Tnjab Barat dengan anggaran sebesar Rp, 438.440.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp, 426.412.500 (97,26 %) dan capaian fisik pekerjaan sebesar 100 %.
- Pengandaan citra satelit Kab. Tanjab Barat dengan anggaran sebesar Rp, 0,- dan realisasi Rp, 0,- atau -
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 2.113.725.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.064.714.000,- (97,68 %) dan capaian fisik kegiatan sebesar 100 %, dengan tersusunnya 4 dokumen RDTR Kawasan.
- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Ruang Terbuka Hijau Kab. Tanjung Jabung Barat dengan anggaran sebesar Rp. 24.815.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.600.000,- atau sebesar 100,00 %.

### **2. Program Pemanfaatan Ruang :**

- Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 201.830.000,- dan realisasi sebesar Rp. 167.475.000,- atau sebesar 100,00 %, dan telah dikeluarkan 37 Rekomendasi Ruang untuk kegiatan usaha.

### **3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang :**

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 178.580.000,- dan realisasi sebesar Rp. 57.000.000,- atau sebesar 100,00%.

#### 4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :

- Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan anggaran sebesar Rp. 118.880.000,- dan realisasi sebesar Rp. 106.850.000,- atau sebesar 100,00 %.
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Terampil Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 256.430.000,- dan realisasi sebesar Rp. 213.138.000,- atau sebesar 100,00 %, melalui kegiatan ini telah dilakukan pelatihan untuk 75 orang tenaga teknis dibidang Beton, Keramik dan Cat.
- Penyusunan Perda Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 90.540.000,- dan realisasi sebesar Rp. 84.470.500,- atau sebesar 100,00 %.

Realisasi Anggaran berdasarkan belanja adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.039.264.800,-	3.839.916.099,-	95,06
2	Belanja Langsung	336.485.924.400	310.389.500.431,76	92,24
	Belanja Pegawai	1.968.981.000,-	1.647.370.000,-	83,67
	Belanja Barang dan jasa	15.717.969.000,-	14.461.006.455,-	92,00
	Belanja Modal	318.798.974.400,-	294.281.123.976,76	92,31
	<b>Jumlah</b>	<b>340.525.189.200,-</b>	<b>314.229.416.530,76</b>	<b>92,28</b>

**Lampiran : 3**  
**Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Kinerja pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>I</b>	<b>PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	%	41	42	45	55	58	59	62	62 %
2	Jalan Konektivitas yang terbangun	Km	16,70	0	12	12	11	10	11	56 Km
3	Persentase Kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	%	0	53	62	70	84	92	100	100 %
4	Berkurangnya Luasan Genangan di Perkotaan	Ha	0	110 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	100 %
5	Persentase rekomendasi IMB dipatuhi	%	1834		100	100	100	100	100	2834 Izin
6	Jumlah kecamatan teraliri air irigasi	Kec	0	13	13	13	13	13	13	13 Kec
7	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang	Peraturan/kebijakan	3		1	4	2	2	1	Peraturan/Kebijakan
8	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	30	40	45	50	55	60	65	65 %

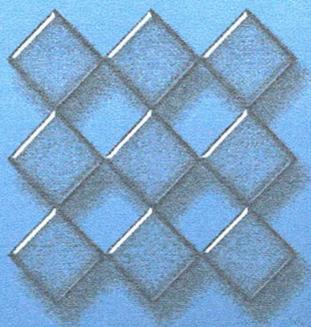
**CAPAIAN KINERJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2018**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data	Rumus	Target 2018	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
1.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan Konektivitas Yang Menghubungkan Semua Wilayah	Persentase jalan dan jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang  Jalan Konektivitas Yang Terbangun	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat	Panjang Jalan kota kondisi baik dan sedang ----- x 100% Total panjang jalan keseluruhan  Panjang Existing Jalan dan Jembatan ----- x 100% Panjang Rencana Kebutuhan	55%	0	5	14	22,609	48,9%	22,609	48,9%	88,91%
2.	Terjaminnya Aliran Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat di Semua Kecamatan	Jumlah Kecamatan Teraliri Air Irigasi	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah kecamatan yang teraliri air irigasi ----- x 100% Jumlah total seluruh kecamatan	13 Kecamatan	0	2 Kec	8 Kec	9 Kec	9 Kec	9 Kec	69%	69%
3.	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Masyarakat Perkotaan	Berkurangnya Luasan Genangan dipertkotaan	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tanjung Jabung Barat	Luas wilayah genangan air ----- x 100% Jumlah seluruh wilayah genangan air	28 ha	0	10 ha	30 ha	48 ha	48 ha	48 ha	171,43%	171,43%
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	Persentase Kecamatan Mendapatkan Aksesibilitas dan Layanan Air Bersih	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tanjung Jabung Barat	Jumlah Kecamatan mendapat akses air bersih ----- x 100% Jumlah total keseluruhan kecamatan	70%	0	10%	50%	69,23%	69,23%	69,23%	69,23%	69,23%
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya sesuai peraturan yang berlaku	Persentase rekomendasi IMB dipatuhi  Jumlah peraturan / kebijakan tata ruang	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tanjung Jabung Barat	Jumlah Rekomendasi yang diawasi ----- x 100% Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan	200 Izin	30	187	260	341	341	341	170,50%	170,50%
6.	Meningkatnya Kualitas penyedia jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	Bidang Penataan Ruang dan Jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah Peraturan yang dibuat ----- x 100% Jumlah seluruh peraturan yang diperlukan	4 Peraturan / Kebijakan	0	0	2 Peraturan / Kebijakan	3 Peraturan / Kebijakan	5 Peraturan / Kebijakan	5 Peraturan / Kebijakan	125%	125%
				Penyedia Jasa yang memenuhi standar kualifikasi ----- x 100% Jumlah seluruh penyedia jasa konstruksi kabupaten	50%	0	10%	25%	37%	37%	37%	74%	74%



*BAB . 4*

**PENUTUP**



## BAB IV - PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat memenuhi target sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa capaian yang masih terkendala proses sehingga belum mencapai realisasi 100 %.

Adapun keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama 1, Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan konektivitas yang menghubungkan semua wilayah yang diukur dengan 2 indikator kinerja, Indikator pertama realisasi pencapaian 188,04 % sedangkan indikator kedua dengan realisasi pencapaian 96,77 % dan capaian indikator keseluruhan untuk indikator pertama adalah 70,24 % dan indikator kedua 79,17 %.
2. Indikator Kinerja Utama 2, Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua Kecamatan, capaian indikator kinerja ini adalah 53,80 % untuk tahun ini.
3. Indikator Kinerja Utama 3, Meningkatnya pelayanan sanitasi masyarakat, diukur berdasarkan luasan daerah genangan yang terpengaruh dari pelaksanaan kegiatan pemeliraaan dan pembangunan drainase, untuk tahun 2018 berkisar 48 Ha capaian secara keseluruhan adalah 67,20 %.
4. Indikator Kinerja Utama 4, Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan, dari target 70 % terealisasi 69,23 %.
5. Indikator Kinerja Utama 5., Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan berlaku. Kinerja ini diukur melalui 2 indikator, indikator 1 adalah Persentase rekomendasi IMB yang dipatuhi. Tahun 2018 target Rekom IMB 200 Unit terealisasi 341 unit atau 170,5 %, namun secara keseluruhan capainya adalah 79,39 %.
6. Indikator Kinerja Utama 6, adalah Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi, dengan indikator kinerja persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi, dengan capaian 74 %..

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaannya seperti, keterbatasan sumber daya antara lain personil dan dana.

## **B. SARAN**

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi atau kendala tersebut di atas adalah :

- Kami akan memperbaiki tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari Proses Musrenbang, Perencanaan Teknis, Proses pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta tahapan proses serah terima pekerjaan.
- ❖ Lebih meningkatkan koordinasi kepada APIP dan Aparat penegak hukum terkait permasalahan di lapangan.
- ❖ Melaksanakan pencatatan aset lebih baik lagi, untuk ini perlu penyusunan Data Dasar yang dijadikan pedoman bersama di dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pencapaian sasaran dan tujuan.

**DAFTAR LAPORAN**  
**KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2018**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data	Rumus	Target 2018	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA	
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV		
1.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan Konektivitas Yang Menghubungkan Semua Wilayah	Persentase jalan dan jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang Jalan Konektivitas Yang Terbangun	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat	Panjang jalan kota kondisi baik dan sedang Total panjang jalan keseluruhan Panjang Existing Jalan dan Jembatan Panjang Rencana Kebutuhan	55%	0	10%	40%	48,9%	48,9%	88,91%
2.	Terjaminnya Aliran Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat di Semua Kecamatan	Jumlah Kecamatan Teraliri Air Irigasi	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah kecamatan yang teraliri air irigasi Jumlah total seluruh kecamatan	13 Kecamatan	0	2 Kec	8 Kec	9 Kec	9 Kec	69%
3.	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Masyarakat Perkotaan	Berkurangnya Luasan Genangan diperkotaan	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tanjung Jabung Barat	Luas wilayah genangan air Jumlah seluruh wilayah genangan air	28 ha	0	10 ha	30 ha	48 ha	48 ha	171,43%
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	Persentase Kecamatan Mendapatkan Aksesibilitas dan Layanan Air Bersih	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tanjung Jabung Barat	Jumlah Kecamatan mendapat akses air bersih Jumlah total keseluruhan kecamatan	70%	0	10%	50%	69,23%	69,23%	69,23%
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dan pengendaliannya sesuai peraturannya yang berlaku	Persentase rekomendasi IMB dipatuhi Jumlah peraturan / kebijakan tata ruang	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tanjung Jabung Barat	Jumlah Rekomendasi yang diawasi Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan Jumlah Peraturan yang dibuat Jumlah seluruh peraturan yang diperlukan	200 Izin	30	187	260	341	341	170,50%
6.	Meningkatnya Kualitas penyedia jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	Bidang Penataan Ruang dan Jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat	Penyedia Jasa yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah seluruh penyedia jasa konstruksi kabupaten	50%	0	10%	25%	37%	37%	125%

Kuala Tungkal, Januari 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

  
**Ir. H. ANDI AKHMAD NUZUL ME**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19620221 199203 1 004